

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DPRD PROVINSI RIAU

A. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 memberikan dampak dan berkah luar biasa bagi perkembangan negeri ini. Tak terkecuali bagi beberapa provinsi yang terbentuk ketika itu. Dengan terbebasnya dari belenggu penjajahan, bangsa Indonesia mulai menata system kenegaraannya.

Kilasan sejarah menunjukkan, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah, melainkan dengan darah, keringat dan air mata. Begitu pun yang dialami oleh rakyat Riau ketika itu. Perjuangan rakyat Riau untuk merebut kemerdekaan adalah masa yang sangat heroic yang lebih awal diperjuangkan daripada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sayangnya perjuangan Riau pada masa itu, belum sepenuhnya mengambil langkah-langkah diplomasi dan kurangnya persenjataan dalam menghadapi Belanda.

Perlawanan menentang Belanda mencapai klimaksnya pada tanggal 10 Februari 1911. Saat itu, ketika Residen Riau, GP de Bruin Kops membacakan surat pemberhentian Sultan Abdurraachman Muazamsyah dan Tengku Besar, Tengku Umar di Gedung Rusyidin Klub, menyebabkan sultan dan para petinggi Kerajaan Riau menyingkir ke Johor dan Singapura.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2014-2019

Sebanyak 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode 2014-2019 resmi dilantik setelah mengucapkan sumpah janji jabatan pada sidang rapat istimewa DPRD Riau di Gedung Lancang Kuning, Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu 6 Agustus tahun 2014. Acara sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Riau H. Annas Maamun, Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman Ketua, Wakil Ketua anggota DPRD priode lalu, jajaran eksekutif serta tamu undangan lainnya.¹⁵

Sedangkan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Riau. Sebelum acara sumpah jabatan dibacakan, Sekretaris Dewan Provinsi Riau Zulkarnain Kadir membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Riau masa jabatan 2009-2014 dan Surat Keputusan Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Riau priode 2014-2019.

Ketua Pengadilan Tinggi Riau membacakan isi sumpah anggota dewan di Ruang Rapat Paripurna Istimewa, sebagai berikut:

“Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945”

¹⁵ <http://dprd.riau.go.id/sejarah/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diikuti oleh seluruh anggota DPRD Riau priode 2014-2019:

“Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, dan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakikan untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Usai membacakan sumpah, anggota dewan menandatangani surat berita acara pembacaan sumpah. Dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari Ketua DPRD lalu Johar Firdaus kepada Ketua Sementara Suparman.

Ketua Sementra DPRD Riau Suparman berterimakasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan seluruh undangan yang menghadiri pelantikan tersebut. *“Kami menyampaikan terimakasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini merupakan momentum penting menandai tugas untuk lima tahun kedepan”.*

Ketua Sementra DPRD Riau juga memohon doa restu kepada segenap masyarakat yang mempercayai 65 orang anggota dewan sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing untuk menjadi wakil rakyat.

“Mudah-mudahan akan lebih baik di masa yang akan datang. Menyadari mengemban tugas ini tidak bisa bekerja sendiri. Oleh sebab itu harapkan dukungan semua pihak pemerintah seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Karena dengan kerja sama bisa mencapai cita-cita kita untuk membangun Riau lebih baik lagi kedepan,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Annas Ma'mun yang menyampaikan kata sambutan Menteri Dalam Negeri yang menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Kemudian melahirkan produk perda bersama kepala daerah dan perangkat untuk memecahkan masalah mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Kemudian ada empat pro. Pro terhadap pemberantasan kemiskinan, Pro perluasan lapangan kerja, pro ekonomi dan kelestarian alam dan lingkungan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan foto bersama dan Ucapan selamat dari para tamu undangan kepada anggota DPRD Riau periode 2014-2019 yang baru dilantik.

Sedangkan 65 anggota DPRD yang dilantik berdasarkan Keputusan Mendagri nomor 161.14-3566 Tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan Anggota DPRD Riau 2014-2013 yakni:

Partai Golkar: Suparman, Masnur, Supriati, Sumiyanti, Erizal Muluk, Nuraini, Ramos Teddy Sianturi, Karmila Sari, Mirza Noor, Abdul Vattah Ali Hasyim Harahap, Sewitri, Septina Primawati, Sulastri dan Indra putra.

PDI Perjuangan: Zukri, James Pasaribu, Almainis, Kordias Pasaribu, Ma'mun Solikhin, Soniwati, Sugeng Pranoto, Syafaruddin Poti, Manahara Manurung.

Partai Demokrat: Noviwaldy Jusman, Agus Triansyah, Aherson, Eko Suharjo, Asri, Magdalisni, Nasril, Eva Uliana, Yulianti.

PAN: Hazmi Setiadi, Bagus Santoso, Sunaryo, Musyafak Asikin, Ade Hartati Rahmat, Syamsurizal, Yurjanji Moga.

Partai Gerindra: Lampita Pakpahan, Adriyan, Marwan Yohanis, Husni Thamrin, Hardianto, Siswaja Muliadi, Taufik Arrakhman

PKB: Abdul Wahid, Muhammad Yusuf, Firdaus, Rosfian, Sugianto, Ade Agus Hartanto.

PPP: T. Nazlah Khairati, Mursini, Husaimi Hamidi, Muhammad Arpah, Yurnalis.

PKS: Mansyur, Mira Roza, Markarius Anwar.

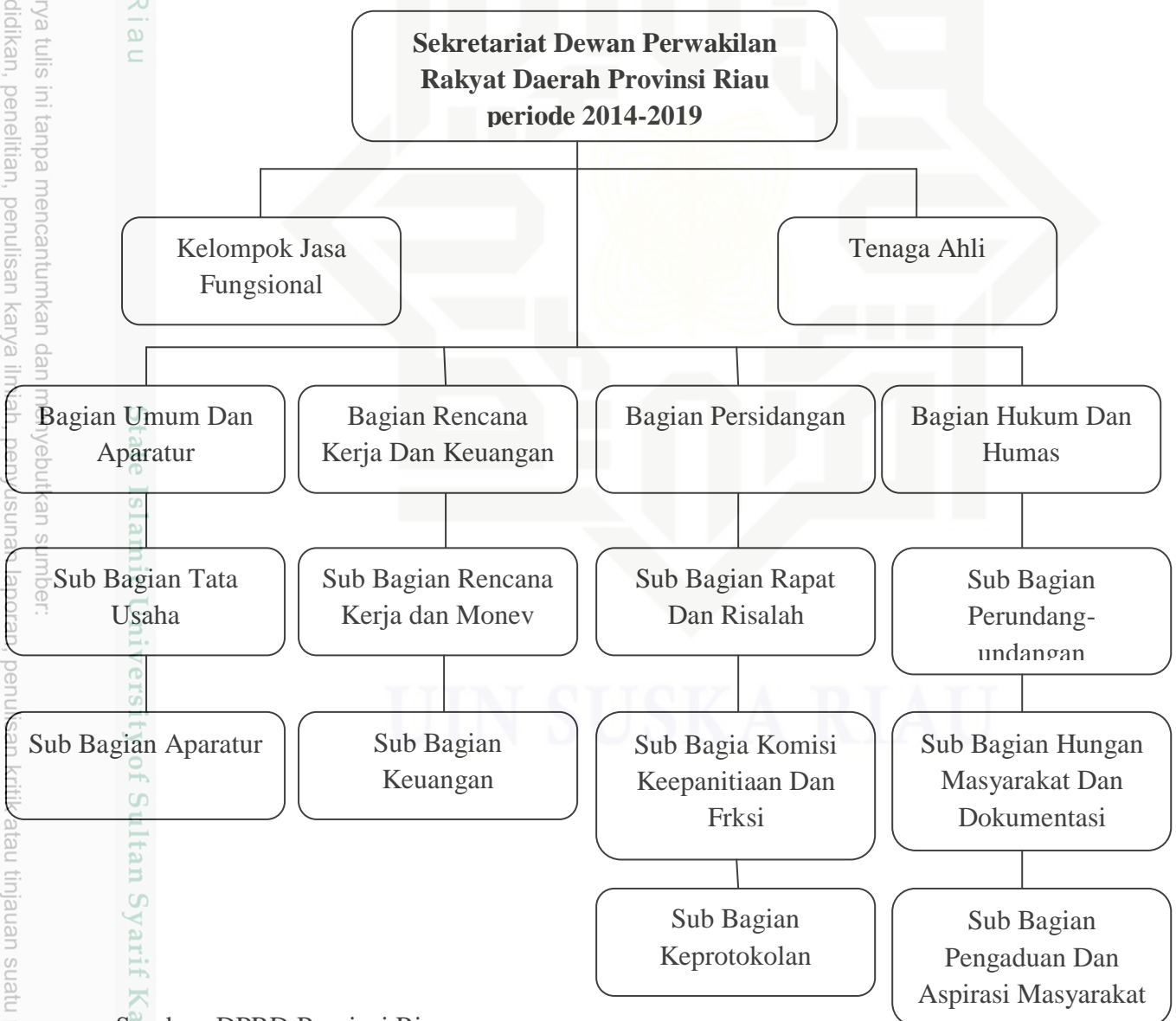
NasDem: Ilyas, Faridah Saad, Said Ismail.

Hanura: Muhammad Adil dan Suhardiman Amby.

1. Struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2014-2019

Untuk Struktur Sekretarit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode 2014-2019 dapat dilihat sebagaimana berikut:

Gambar:
Struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode 2014-2019



Sumber: DPRD Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2014-2019

Untuk Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2014-2019, antaranya:

a. Visi dan Misi Daerah Tahun 2014-2019

1) Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019

a) Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 sebagai berikut: Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunkan kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

b) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 -2019, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
- 2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
- 3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
- 4) Menurunkan Kemiskinan
- 5) Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
- 6) Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
- 7) Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Meningkatkan Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata

9) Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

- c) Visi Riau 2020, menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001: “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Untuk memberikan gambaran secara nyata sebagai upaya penjabaran Visi Pembangunan Riau 2020, maka perlu visi antara dalam visi 5 tahunan agar setiap tahap untuk periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Untuk itu guna mewujudkan visi pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan visi antara lain sebagai berikut :

- d) Visi

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan, melalui kesiapan infrastruktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkemampuan, profesional, bermoral, serta keteladanan pemimpin dan aparat, melalui penguatan kelembagaan, kualitas aparat dengan system rekrutmen profesional, penguatan Balitbang, penggunaan ICT, penguatan good governance, dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- 2) Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penekanan pada kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat beragama, seni budaya dan moral (*human resources development*).
- 3) Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama Program Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan Kebodohan, dan Pembangunan Infrastruktur.
- 4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur (*spread of development equilibrium between region and society*).
- 5) Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan mereka dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor (*empowerment of society base economy*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dan sarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran
- 7) Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan rasa aman dengan kepastian hukum, percepatan pelayanan izin usaha penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, promosi dan media serta mitra usaha dagang.
- 8) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan (*empowerment of social and rural institution*).
- 9) Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (*strengthening of mal ay culture*).
- 10) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan Daerah melalui pembangunan database penduduk Riau, digitasi Nomor Penduduk Riau dengan kartu digital.
- 11) Mewujudkan pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan, konsep pembangunan kawasan perkotaan, perdesaan dan pemukiman terpadu. Mewujudkan penanganan berbagai dampak dari issue pemanasan global ("*global warming*"), kenaikan harga BBM dan rawan pangan melalui penanganan berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang.